PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Lampiran 4.b. Rencana Aksi Kinerja 2016

Rencana Aksi Kinerja 2016
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 1 : Meningkatkan Kinerja Penataan Ruang yang Berkualitas dan Implementatif													**5.565.643.000,00**													
1	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Perda RTR KSP di Jawa Barat				1 Dokumen	Dokumen	**Program Penataan Ruang**					**3.546.948.000,00**													
								1	Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan	Tersedianya Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan	1 (satu) Dokumen		456.640.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
								2	METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur Kabupaten Bogor	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan Gunung Sindur sebagai kawasan pertanian lahan basah	Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta		927.635.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
								3	METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Water Front City Cirebon	Terlaksananya penyusunan Perencanaan Kawasan Water Front City Cirebon	Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Water Front City Cirebon a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta		31.800.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
								4	METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor	Terlaksananya penyusunan Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor	Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta		695.159.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
								5	CLTH-Perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan	Tessusunya dokumen perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan	-Tersedianya dokumen perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan sebanyak 15 dokumen '- Terlaksananya kegiatan workshop sebanyak 2 kali		283.785.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
								6	Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Karst Citatah	Terfasilitasinya Penyusunan Studi Kelayakan Karst Citatah	Tersedianya dokumen Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Karst Citatah a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta		830.704.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
								7	Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat	Teridentifikasinya progres RTH di kabupaten/kota	Tersedianya dokumen Pengembangan Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota di jawa Barat a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta		321.225.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
		Jumlah				3 Dokumen	Dokumen	**Program Penataan Ruang**					**469.325.000,00**													

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ketersediaan Perda RDTR Kabupaten Kota di Jawa Barat						1	Evaluasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Terbitnya Surat Persetujuan Substansi Gubernur terhadap dokumen RRTR di kabupaten/kota	Terbitnya surat persetujuan substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota dari Gubernur untuk setiap pengajuan Persetujuan Substansi Rapaerda RRTR Kabupaten/Kota		469.325.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
2	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara				70%	%	**Program Penataan Ruang**					**1.549.370.000,00**													
								1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hasil Review RTRWP Jawa Barat	Tersusunnya Kajian KSP Hasil Review RTRWP Jawa Barat	1 (satu) Dokumen		700.235.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
								2	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat	1. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota dan KSP 2. Fasilitasi rekomendasi gubernur untuk pemanfaatan ruang KBU 3. Fasilitasi Forum Mitra KBU 4. Sosialisasi Perda KBU 5. Evaluasi kinerja pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat	1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota, 1 kali rapat koordinasi, dan tersusunnya dokumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP Jawa Barat 2. Tersusunnya kajian teknis permohonan rekomendasi gubernur untuk pemanfaatan ruang KBU 100% terhadap berkas permohonan masuk yang diajukan lengkap 3. Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat konsolidasi dan 2 kali pembinaan Forum Mitra KBU 4. Terlaksananya 3 kali sosialisasi Perda KBU 5. Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Barat		849.135.000,00	Kepala Bidang Tata Ruang												
								3	Kajian Kelayakan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini	Terlaksananya Kajian Kelayakan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini	Dokumen Kajian Kelayakan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta		0	Kepala Bidang Tata Ruang												
Misi 2; Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan dan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman													**254.415.357.450,00**													
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum				70%	%	**Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**					**22.600.355.000,00**													
								1	Pengembangan SPAM Perdesaan	1) Terlaksananya Program Pamsimas di 15 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan SPAM Perdesaan 3) Terlaksananya pembangunan SPAM Desa Sukahurip, Kec. Pangatikan, Kab. Garut dan Desa Sundakerta, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya`	1) Terlaksananya Program Pamsimas di Kab. Garut, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Kuningan, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sukabumi, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Cirebon, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Ciamis dan Kab. Pangandaran 2) Monitoring dan evaluasi pengembangan SPAM Perdesaan di Provinsi Jawa Barat 3) Pembangunan SPAM Desa Sukahurip, Kec. Pangatikan, Kab. Garut dan Desa Sundakerta, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya		551.150.000,00	Kepala Bidang Permukiman												

www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange
www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat	Terdampinginya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat	100%		283.000.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								3	METR Pengembangan SPAM Metropolitan Bandung Raya	Meningkatnya ketersediaan air bersih di wilayah rawan air melalui fasilitasi SPAM Regional Metropolitan Bandung serta pembangunan pipa transmisi dan distribusi	77,50%		19.450.610.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								4	METR Penyusunan Rencana Induk SPAM Jawa Barat	1 Dokumen Rencana Induk SPAM Jawa Barat	100%		1.708.875.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								5	Penyusunan Kebijakan SPAM Jawa Barat	1 Dokumen Jakstrada Jawa Barat	100%		606.720.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik				65%	%	**Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**					**7.106.103.750,00**													
								1	METR-Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bandung Raya	Dokumen Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bandung Raya	1.Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 100%		1.487.101.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								2	GCB-Monitoring dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum	1. Terpantaunya pembangunan dan pengeblaan sanitasi bertumpu pada masyarakat di DAS Citarum 2. Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan GCB	1. 55 Desa 2. 1 Kegiatan (3 hari)		43.853.750,00	Kepala Bidang Permukiman												
								3	SANI-Monitoring dan Evaluasi Teknis Pembangunan Sanitasi Jawa Barat	Terfasilitasinya pembangunan sanitasi di Jawa Barat	500 unit		566.970.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								4	PPP-Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran	Dokumen Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran	1.Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 3.Rencana Induk Persampahan, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar.		13.042.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								5	METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Cirebon Raya	Dokumen Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Cirebon Raya	1.Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar.		1.409.062.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								6	METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur	Dokumen Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur	1.Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar.		1.559.053.000,00	Kepala Bidang Permukiman												

www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange
www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7	Konsep Pembangunan Public Art Work Sister Province Jawa Barat dan Australia Selatan	Tersusunnya Konsep simbol Kerjasama Jawa Barat dan Australia Selatan	Konsep Simbol Kerjasama Jawa Barat dan Australia Selatan		160.000.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								8	PPP-Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah, dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhan Ratu	Dokumen Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu	1.Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 3.Rencana Induk Persampahan, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 100%		1.076.880.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
								9	PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	Dokumen Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	1.Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar. 3.Rencana Induk Persampahan, terdiri dari Laporan pendahuluan 3 eksemplar, Laporan antara 3 eksemplar dan Laporan akhir 3 eksemplar.		790.142.000,00	Kepala Bidang Permukiman												
		Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan				67%	%	**Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**					**24.089.676.800,00**													
								1	Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional TPPAS Regional Legok Nangka	65%		4.441.217.300,00	Kepala BPSR												
								2	Pembangunan TPPAS Regional Nambo	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional TPPAS Regional Nambo	65%		4.686.980.000,00	Kepala BPSR												
								3	Pengelolaan TPK Sarimukti	Pembangunan sarana prasarana dan operasional TPK Sarimukti	65%		11.981.619.500,00	Kepala BPSR												
								4	Advisory teknis BPSR	Tersedianya tenaga ahli untuk pendampingan teknis personil BPSR	65%		1.264.250.000,00	Kepala BPSR												
								5	Penyusunan Rencana Induk Persampahan dan TPPAS Regional Ciayumajakuning	Penyusunan DED pembangunan sarana dan prasarana TPPAS Regional Ciayumajakuning, Penilaian Lahan	65%		1.010.690.000,00	Kepala BPSR												
								6	Penataan TPA Leuwigajah	Tersedianya saran penunjang operasional	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Jawa Barat		704.920.000,00	Kepala BPSR												
5	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di jawa Barat	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan				2 Kawasan	Kawasan	**Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga**					**59.971.877.200,00**													
								1	PONPAR Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Permanen Pendukung Venue PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat	Pengadaan sarana dan prasarana non permanen pendukung pertandingan PON XIX Tahun 2016	150 Unit		32.842.806.000,00	Kepala Bidang Permukiman												

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2	PONPAR Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat	1. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) I - ITB Jatinangor Kab. Sumedang (lanjutan, dalam PON dipergunakan untuk pertandingan Cabang Olahraga Pencak Silat) 2. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) II dan III - ITB Jatinangor Kab. Sumedang (lanjutan, dalam PON dipergunakan sebagai arena pertandingan Cabang Olahraga Futsal) 3. Pembangunan Sarana Panjat Tebing dan Sepeda Gunung Lembang Kab. Bandung Barat (lanjutan) 4. Perbaikan jalan lingkungan di Kawasan Situ Cipule Kabupaten Karawang (dalam PON dipergunakan untuk pertandingan Cabang Olahraga Dayung) 5. Perbaikan jalan lingkungan di Kawasan Bandung Giri Gahana di Jatinangor Kab. Sumedang (dalam PON dipergunakan untuk pertandingan Cabang Olahraga Golf) 6. Pengawasan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) I - ITB Jatinangor 7. Penyesuaian Desain, pelelangan dan pengawasan berkala pembangunan Gedung Olahraga (GOR) I - ITB Jatinangor Kabupaten Sumedang 8. Pengawasan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) II dan III - ITB Jatinangor Kabupaten Sumedang (lanjutan) 9. Penyesuaian Desain, pelelangan dan pengawasan berkala pembangunan Gedung Olahraga (GOR) II dan III - ITB Jatinangor Kabupaten Sumedang 10. Pengawasan pembangunan sarana panjat tebing dan sepeda gunung Lembang Kabupaten Bandung Barat 11. Penyesuaian Desain, pelelangan dan	1). 1 lokasi 2). 1 lokasi 3). 1 lokasi 4). 1 lokasi 5). 1 lokasi 6). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 7). 1 berkas dokumen 8). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 9). 1 berkas dokumen 10). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 11). 1 berkas dokumen 12). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 13). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir		27.129.071.200,00	Kepala Bidang Permukiman													
								Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman					**46.322.809.000,00**													
								1	Perencanaan dan Pembangunan Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat	1). Pembangunan tahap I kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat 2). Pengawasan pembangunan tahap I kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat 3). Perencanaan teknis penataan kawasan monumen perjuangan Jawa Barat	1). 1 lokasi 2). 3 Laporan pendahuluan, 3 laporan harian, 3 laporan akhir 3). Laporan pendahuluan 3 buku, laporan antara 3 buku, laporan draft akhir 3 buku, laporan akhir 3 buku, dokumen pelelangan (RAB, RKS dan gambar rencana) @ 3 buku, CD 3 buah		13.497.000.000,00	Kepala Bidang Permukiman													
								2	Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage	1. Penyusunan DED pembangunan masjid raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage 2. Pematangan lahan pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage (Tahap I) 3. Manajemen Konstruksi pembangunan masjid raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage (tahap I) 4. Penyusunan AMDAL pembangunan masjid raya provinsi Jawa Barat di Gedebage	1. 10 laporan pendahuluan, 10 laporan antara, 10 laporan pra desain, 10 laporan akhir, 10 produk akhir (album gambar, RAB, RKS, CD laporan) 2. 1 lokasi 3. 3 buku laporan harian, 3 buku laporan bulanan, 3 buku laporan akhir, album gambar, CD 4. 3 laporan pendahuluan, 3 laporan antara antara, 3 laporan akhir, 3 buku AMDAL		19.733.698.000,00	Kepala Bidang Permukiman													
								3	Penataan Kawasan Gasibu Tahap II	1. Perencanaan dalam rangka penyesuaian design dan pengawasan berkala penataan Kawasan Gasibu Tahap II 2. Pengawasan penataan Kawasan Gasibu Tahap II 3. Penataan Kawasan Gasibu Tahap II	1. 3 buku laporan 2. 3 buku laporan harian, 3 buku laporan bulanan, 3 buku laporan akhir 3. 1 kawasan		13.092.111.000,00	Kepala Bidang Permukiman													
								Program Sumber Daya Kesehatan					**14.355.990.600,00**													

www.docu-track.com PDF-XChange Click to buy NOW!
www.docu-track.com PDF-XChange Click to buy NOW!

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1	Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru RS Paru Provinsi Jawa Barat	-	-		40.585.600,00	Kepala Bidang Jasa Konstruksi													
								2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat	Terawatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang ada dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	- Terawatnya bangunan : Gedung IGD, Gedung Gizi, Gedung Rawat Inap Kelas 3, Gedung Radiologi, Gedung Kantor dan Sarana Jalan. - Tersusunya dokumen : AMDAL, Masterplan, dan dokumen DED RSUD Pameungpeuk Garut Kelas B.		14.315.405.000,00	Kepala Bidang Jasa Konstruksi													
								Program Pengembangan Nilai Budaya					**1.492.245.000,00**													
								1	Penyusunan DED Museum Jatigede	Penyusunan DED Museum Jatigede	Laporan pendahuluan 3 buku, laporan antara 3 buku, draft laporan akhir 3 buku, laporan akhir 3 buku, (album gambar, RAB, RKS/dokumen lelang, CD) 3 set		1.492.245.000,00	Kepala Bidang Jasa Konstruksi													
6	Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni				92,78%		**Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**72.885.583.300,00**													
								1	Kajian Lingkungan Pembangunan RUSUNAWA di Kab. Bandung Barat dan Kota Bogor	Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan untuk Pembangunan Rusunawa di Kota Bogor dan Kabupaten Bandung Barat	- Laporan Pendahuluan - Laporan Antara - Laporan AKhir - Dokumen Hasil Kajian Lingkungan		967.981.000,00	Kepala Bidang Perumahan													
								2	Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Permukiman dan Perumahan	Laporan pelaksanaan Hibah dan Bankeu Bidang Permukiman dan Perumahan	1 laporan		87.609.000,00	Kepala Bidang Perumahan													
								3	Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan	Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman Perdesaan	3 (Tiga) Kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Cianjur		287.007.000,00	Kepala Bidang Perumahan													
								4	Perencanaan dan Identifikasi Lokasi Pembangunan Rusunawa di KSP Jatinangor, Kota/Kab. Sukabumi dan Kab/Kota. Cirebon	Tersedianya Dokumen Perencanaan untuk lokasi Rusunawa Di KSP Jatinangor dan identifikasi rusunawa di Sukabumi dan Cirebon	- Laporan Pendahuluan - Buku Draft - Buku Perencanaan dan Identifikasi - Executive Summary		481.867.000,00	Kepala Bidang Perumahan													
								5	RTLH_Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	1. Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni 2. Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni	1. Rumah tidak layak Huni sebanyak 1.410 unit Rumah 2. Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Progres Bulanan		1.765.432.500,00	Kepala Bidang Perumahan													
								6	Pendataan Bidang Perumahan di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen pendataan dan mekanisme pendataan bidang perumahan	Dokumen Pendataan Bidang Perumahan		457.796.500,00	Kepala Bidang Perumahan													
								7	METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bandung Raya	Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan	1 Dokumen		938.367.500,00	Kepala Bidang Perumahan													
								8	METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya	Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya	1 Dokumen		974.226.000,00	Kepala Bidang Perumahan													
								9	METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bodebekkarpur	Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Metropolitan Metropolitan Bodebekkarpur	1 Dokumen		1.092.885.000,00	Kepala Bidang Perumahan													
								10	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran	Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran	1 Dokumen		486.568.000,00	Kepala Bidang Perumahan													
								11	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu	Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Metropolitan Pelabuhan Ratu	1 Dokumen		480.826.000,00	Kepala Bidang Perumahan													
								12	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	1 Dokumen		472.972.000,00	Kepala Bidang Perumahan													

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
															Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								13	Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat	1). Pembangunan tahap II masjid Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon 2). 3). Pembangunan tahap I masjid Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran 4). Pembangunan tahap I masjid Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi 5). Pembangunan tahap I masjid Jawa Barat di Kabupaten Garut 6). 7). Pengawasan pembangunan tahap II masjid Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon 8). 9). Pengawasan pembangunan tahap I masjid Jawa Barat di Kabupaten Pangadaran 10). Pengawasan pembangunan tahap I masjid Jawa Barat di Kabupaten Garut 11) 12). Pengawasan pembangunan tahap I masjid Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi 13). Perencanaan pembangunan masjid tahap II Jawa Barat di Plumbon Kab. Cirebon (pengawasan berkala) 14). 15). Perencanaan pembangunan masjid tahap I Jawa Barat di Kab. Pangandaran (pengawasan berkala) 16). Perencanaan pembangunan masjid tahap I Jawa Barat di Kab. Sukabumi (pengawasan berkala) 17). 18). Perencanaan pembangunan masjid tahap II Jawa Barat di Kab. Garut (pengawasan berkala) 19). Penyempurnaan masjid Gedung Sate (Tahap III)	1). 1 unit 2). 3). 1 unit 4). 1 unit 5). 1 unit 6). 7). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 8). 9). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 10). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 11). 12). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 13). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 14). 15). 3 laporan akhir 16). 3 laporan akhir 17). 18). 3 laporan akhir 19). 1 unit 20). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir 21). 3 laporan 22). 1 unit 23). 3 laporan harian, 3 laporan bulanan, 3 laporan akhir		64.392.045.800,00	Kepala Bidang Perumahan												
								Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman					**5.590.716.800,00**													
								1	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa	Meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa	Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa Rancaekek, Solokanjeruk, ujungberung, batujajar dan Kantor Balai		5.590.716.800,00	Kepala BP3JB												
Misi 3: Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pengujian Mutu													**3.686.187.600,00**													
7	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruiksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat				31%	%	**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**					**2.418.000.000,00**													
								1	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1. Tersertifikasinya SDM jasa konstruksi yang mendapat pelatihan di bidang jasa konstruksi. 2. Terbinanya para pelaksana/Pengelola teknis di bidang Jasa Konstruksi yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Teknis di Jawa Barat. 3. Terakomodirnya masukan-masukan dari penyedia jasa dan pengguna jasa sebagai bahan peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi di Jawa Barat.	1.630 Peserta dari 18 lokasi kab./kota di Jawa Barat 2. 30 Peserta dari 1 BKPP Wilayah di Jawa Barat 3. 250 Peserta dari 27 kab./kota.		1.495.000.000,00	Kepala Bidang Jasa Konstruksi												

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	1. Sosialisasi Norma / Standar NSPK Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2 .Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Jawa Barat 3. Standar Pelayanan Minimal Pembinaan Jasa Konstruksi di Jawa Barat 4. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jawa Barat	1. Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Jawa Barat (60x4 Wilayah/Lokasi) 2. Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi se Jawa Barat 3. Masyarakat Jasa Konstruksi		923.000.000,00	Kepala Bidang Jasa Konstruksi												
8	Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani				1320 Sampel	Sampel	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**					**462.536.600,00**													
								1	Peningkatan dan Pelayanan BPMKL	Terlayaninya permintaan pengambilan contoh uji dan pengujian lapangan	153 permintaan pengambilan contoh uji		462.536.600,00	Kepala BPMKL												
9	Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah				80%	%	**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**					**805.651.000,00**													
								1	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara	- Tersedianya harga satuan pekerjaan bangunan gedung - Tersedianya dokumen perkiraan biaya pembangunan/perawatan bangunan gedung - Tersedianya dokumen penghapusan, penaksiran/penilaian bangunan gedung - Terkelolanya administrasi alih status dan pelepasan rumah negara - Tersedianya sistem informasi pengeblaan teknis pembangunan bangunan gedung negara/daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat - Tersedianya DED prototip kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa untuk wilayah Provinsi Jawa Barat	- Tercetaknya 135 buku analisa harga satuan pekerjaan bangunan gedung - Tercetaknya 5 buku dokumen perkiraan pembangunan/perawatan bangunan gedung negara/daerah - Tercetaknya 5 buku dokumen penghapusan, penaksiran/penilaian bangunan gedung - Tercetaknya 5 buku dokumen alih status, SIP dan pelepasan rumah negara - Terkelolanya 150 permohonan per tahun bantuan pengelola teknis pembangunan bangunan gedung negara/daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat secara teknologi informasi - Terpenuhinya kebutuhan DED prototip kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa di wilayah Provinsi Jawa Barat		805.651.000,00	Kepala Bidang Jasa Konstruksi													
Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Prinsip Good													**40.089.602.300,00**													
10	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan				40 Orang	Orang	**Program Peningkatan Kesejahteraan**					**1.921.332.400,00**													
								1	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Tercapainya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	100%		1.577.638.400,00	Sekretaris Dinas												
								2	Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL Diskimrum	1. Peningkatan kompetensi personil BPMKL dalam bidang manajamen dan atau teknis laboratorium berdasarkan SNI/ISO IEC 17025:2008. 2.Peningkatan kualitas kesehatan personil BPMKL 3. Peningkatan kualitas spirtual personil BPMKL	-Terlaksananya senam pagi , terlaksananya siraman rohani, terlaksananya pelatihan in house, terlaksananya pelatihan singkat di lembaga yang kompeten		242.550.000,00	Sekretaris Dinas												
								3	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB	Perlengkapan kesehatan; Bintek; Pelatihan Pengembangan Diri	5 set; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan		74.144.000,00	Sekretaris Dinas												
								4	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR	Meningkatnya kapasitas aparatur BPSR	8 orang		27.000.000,00	Sekretaris Dinas												
11	Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan				85%	%	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**					**8.393.552.300,00**													
								1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa profesi	1 Tahun		1.830.786.000,00	Sekretaris Dinas												

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perumahan						2	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL-Diskimrum	1. Terlaksananya kegiatan asesment dari KAN 2. Tersedianya pembayaran berlangganan telepon, internet, listrik, dan koran. 3. Terlaksananya perjalanan dinas 4. Terbayaranya honorarium non PNS 5. Terlaksananya pengujian di TPPAS Legok Nangka, TPK Sarimukti, TPPAS leuwigajah 6. Tersedianya barang pakai habis	1. 1 kali 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun 5. 1 kegiatan 6. 1 tahun		2.337.620.300,00	Sekretaris Dinas													
								3	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung kinerja aparatur	100%		3.588.016.000,00	Sekretaris Dinas												
								4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSR	Pengadaan ATK, jasa kantor, perjalanan dinas, biaya makanan dan minuman	120 orang karyawan UPTD BPSR		637.130.000,00	Sekretaris Dinas												
								Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					**99.336.850,00**													
								1	Perencanaan Lingkup Bidang Permukiman dan Perumahan	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang permukiman dan perumahan di jawa barat	27 kab/kota		99.336.850,00	Sekretaris Dinas												
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					**79.800.000,00**													
								1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	1. 4 Dokumen Perencanaan (Renja, RKT, RKA, DPA) 2. 2 Dokumen Evaluasi (LKIP, LKPJ)		79.800.000,00	Sekretaris Dinas												
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**7.341.420.650,00**													
								1	Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR (Revitalisasi)	Tersedianya nya sarana dan prasarana penunjang operasional BPSR	65%		351.570.000,00	Sekretaris Dinas												
								2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur	100%		3.914.796.300,00	Sekretaris Dinas												
								3	Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	1 Tahun		795.702.500,00	Sekretaris Dinas												
								4	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum	1. Pengadaan perlengkapan kantor 2. Pengadaan komputer 3. Pengadaan meubelair 4. Pengadaan alat komunikasi 5. Pengadaan alat ukur 6. Pengadaan alat laboratorium 7. Renovasi mushola 8. Pengadaan Kendaraan Lapangan 9. Karoseri Kendaraan Lapangan. 10. Pengadaan Alat Sampling Udara dan Debu 11. Pengadaan Lemari Laboratorium 12. Pembuatan Ruang Penerima Contoh Uji Seksi Uji Air dan Lingkungan 13. Pengadaan Alat Studio	1. 9 unit, 1 paket 2. 8 set; 14 unit; 12 unit 3. 3 paket;40 buah, 1 set 4. 2 unit 5. 1 paket dan 2 unit 6. 4 paket, 1 unit 7. 45 m2 8. 1 unit 9. 1 paket 10. 2 unit dan 1 paket 11. 1 paket 12. 1 paket 13. 3 unit		2.279.351.850,00	Sekretaris Dinas													
								Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					**22.155.720.100,00**													

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Satuan	Dukungan program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rupiah)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR	1) BBM alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional 2) Pelumas alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional 3) Service dan penggantian suku cadang alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional 4) Pemeliharaan infrastruktur, bangunan, dan perlengkapan kantor	2 unit landfill compactor, 5 unit buldozer, 5 unit excavator, 2 unit wheeloader, 2 unit mesin kompos, 3 unit genset, 4 unit kendaraan operasional roda empat, 5 unit kendaraan operasional roda dua		11.666.007.000,00	Sekretaris Dinas												
								2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Tersedianya aset-aset Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang baik dan layak	100%		5.293.901.200,00	Sekretaris Dinas											
								3	Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Tercapainya pemeliharaan pengelolaan rusunawa provinsi jawa barat	4 Lokasi		3.850.836.500,00	Sekretaris Dinas											
								4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL	1. Terpeliharanya perlengkapan laboratorium 2. Terpeliharanya peralatan laboratorium 3. Terpeliharanya gedung BPMKL 4. Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan kantor 5. Terpeliharanya seluruh kendaraan operasional	100%		1.344.975.400,00	Sekretaris Dinas											
								Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah					**98.440.000,00**													
								1	Pengelolaan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan	1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengebla keuangan dilingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2. Terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan, 3. Tersusunnya laporan keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	1 Dokumen, 1 Dokumen, 12 Bulan		98.440.000,00	Sekretaris Dinas											
												JUMLAH	**303.756.790.350,00**													

Click to buy NOW! PDF-XChange www.docu-track.com
Click to buy NOW! PDF-XChange www.docu-track.com

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Lampiran 4.c. Mekanisme pengumpulan data kinerja tahun 2016

DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor Standar Operasional Prosedur	41.3.2013
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Nama Standar Operasional Prosedur :
Penyusunan LKPJ, LKIP dan LPPD

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
2. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 19 Seri E
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Yang menguasai bidang evaluasi perencanaan mampu mengoperasikan komputer
2. Kualifikasi Pendidikan : S1

Keterkaitan :

- SOP Penyusunan Tim Penyusun LKPJ/LPPD/LKIP
- SOP Pembuatan Surat Undangan

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Komputer, kelengkapannya dan software
2. ATK

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Subag Perencanaan Program	Tim Penyusun LKPJ/LKIP	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan rapat dengan tim penyusun LKPJ/LPPD/LKIP untuk memberikan arahan teknis penyusunan LKPJ/LPPD/LKIP hasil bimbingan Bappeda (LKPJ) Biro Pemerintahan Umum (LPPD), Biro Organisasi (LKIP) selaku koordinator kepada tim penyusun					- Nota Dinas Penyusunan LKPJ/LPPD/LKIP dari Sekretaris	1 hari	Notulen Rapat Koordinasi pembahasan teknis penyusunan Dokumen LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa	SOP Penyusunan Tim Penyusunan LKPJ/LPPD/LKIP
						-Adanya Nota Dinas Undangan Rapat untuk Tim Penyusun LKPJ/LPPD/LKIP			SOP Pembuatan Surat Undangan / Nota Dinas
						- Bahan Rapat : Petunjuk teknis penyusunan LKPJ/LPPD/LKIP sesuai hasil bimbingan Instansi Pemerintah terkait diemailkan kepada Tim Penyusun LKPJ/LPPD/LKIP			
2	Melaksanakan koordinasi ke Bidang/Seksi untuk mengumpulkan data dan bahan penyusunan LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat					Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen LKPJ/LPPD/LKIP Sesuai hasil bimbingan	3 hari	Terkumpulnya bahan penyusunan LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	
3	Menyusun draft LKP/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat					Bahan Penyusunan Dokumen LKPJ/LPPD/LKIP	14 hari	Draft LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	
4	Mengoreksi draft LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat apabila ada masukan/perbaikan dari Bidang/Seksi, kemudian dikembalikan kepada Tim Penyusun LKPJ/LPPD/LKIP					Draft LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	5 hari	Draft LKPJ/LPPD/LKIP diparaf Sub Bagian Perencanaan Program sebelah kiri	
5	Memeriksa Draft LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Sub Bagian Perencanaan Program					Draft LKPJ/LPPD/LKIP sudah diparaf Sub bagian perencanaan program	1 hari	Draft LKPJ/LPPD/LKIP diparaf Sekretaris di sebelah kanan nama jabatan	

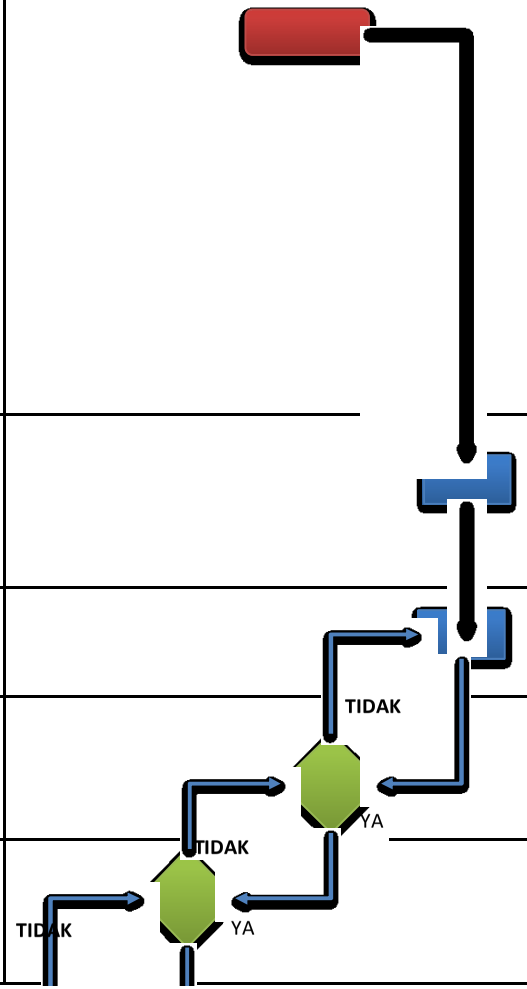

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Subag Perencanaan Program	Tim Penyusun LKPJ/LKIP	Persyaratan	Waktu	Output	
6	Menyetujui draft LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada sekretaris					Draft LKPJ/LPPD/LKIP diparaf Sekretaris	1 hari	Draft LKPJ/LPPD/LKIP sudah ditandatangan Kepala Badan	
7	Menyerahkan LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat ke Bappeda (LKPJ), Biro Pemerintahan Umum (LPPD) dan Biro Organisasi (LKIP)					LKPJ/LPPD/LKIP ditandatangani Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Provisni Jawa Barat	1 hari	Tanda Terima LKPJ dari Bappeda, LPPD dari Biro Pemerintahan Umum,LKIP dari Biro Organisasi	
8	Mendokumentasikan Dokumen LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat					LKPJ/LPPD/LKIP yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan dicap	1-2 hari	LKPJ/LPPD/LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sudah didokumentasikan/diarsikan sebagai bahan pertanggungjawaban AKIP	

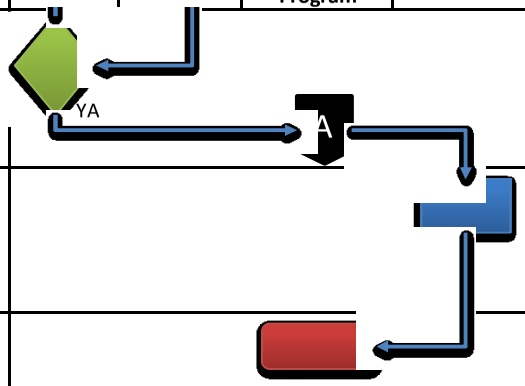

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI			KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN		KEPALA BALAI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL (BPSR)			KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN		
4.1.1 Persentase Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi yang bersertifikat			**3.1.1** Cakupan tingkat Penghunian Rusunawa Jawa Barat		**2.2.2** Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan			**4.2.1** Jumlah contoh uji yang dapat dilayani		
5.1.1 Tingkat Kepuasan Instansi yang dibantu										
KASIE BINA TEKNIK DAN GEDUNG NEGARA	**KASIE PEM BERDAYAAN**	**KASIE PENGATURAN DAN PENGAWASAN**	**KA SUB BAG TATA USAHA**	**KOORDINATOR SUB UNIT RUMAH SUSUN SEWA**	**KA SUB BAG TATA USAHA**	**KASIE PERENCANAAN DAN EVALUASI**	**KASIE OPERASIONAL**	**KA SUB BAG TATA USAHA**	**KASIE UJI TANAH BANGUNAN DAN KONSTRUKSI**	**KASIE UJI AIR DAN LINGKUNGAN**
5.1.1 - Daftar harga bahan dan upah serta analisa harga satuan pekerjaan konstruksi bangunan gedung - Daftar perkiraan pembiayaan pembangunan/perawatan bangunan gedung - Dokumen penghapusan, penaksiran/penilaian bangunan gedung - Dokumen alih status, SIP, dan pelepasan rumah negara - Sistem informasi pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara/daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat - DED prototip kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa di wilayah Provinsi Jawa Barat	**4.1.1** 1. Tersertifikasinya SDM jasa konstruksi yang mendapat pelatihan di bidang jasa konstruksi. 2. Terbinanya para pelaksana/Pengelola teknis di bidang Jasa Konstruksi yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Teknis di Jawa Barat. 3. Terakomodirnya masukan-masukan dari penyedia jasa dan pengguna jasa sebagai bahan peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi di Jawa Barat.	**4.1.1 1.** Sosialisasi Norma / Standar NSPK Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2 .Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Jawa Barat 3. Standar Pelayanan Minimal Pembinaan Jasa Konstruksi di Jawa Barat 4. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jawa Barat **4.1.1** Terbangunnya gedung kamar bedah, gedung CSSD dan gudang di RSP Sidawangi Kab. Cirebon. 4.1.1 Sarana dan Prasarana pelayanan RSUD yang memadai dalam rangka peningkatan status rumah sakit dari kelas C menjadi kelas B.	**3.1.1** Perlengkapan kesehatan; Bintek; Pelatihan Pengembangan Diri **3.1.1** Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa profesi **3.1.1** Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran **3.1.1** Tercapainya pemeliharaan pengelolaan rusunawa provinsi jawa barat	**3.1.1** Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa Rancaekek, Solokanjeruk, Ujung berung dan Batujajar	**2.2.2** Meningkatnya kapasitas aparatur BPSR **2.2.2** Pengadaan ATK, jasa kantor, perjalanan dinas, biaya makanan dan minuman **2.2.2** Tersedianya sarana dan prasarana UPTD BPSR	**2.2.2** Penyusunan DED pembangunan sarana dan prasarana TPPAS Regional Ciayumajakuning, Penilaian Lahan **2.2.2** Tersusunnya DED penataan TPA Leuwigajah	**2.2.2** Pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional TPPAS Regional Legok Nangka (Penambahan pengumuman lelang investasi TPPAS Regional Legok Nangka dan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan TPPAS Regional Legok Nangka) **2.2.2** Pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional TPPAS Regional Nambo **2.2.2** Pembangunan sarana prasarana dan operasional TPK Sarimukti (Penambahan pengadaan pipa lindi dan gas, Pembangunan jalan TPK Sarimukti, Normalisasi saluran drainase jalan utama TPK Sarimukti, Pengadaan dan pemasangan penerangan di TPK Sarimukti **2.2.2** Tersedianya tenaga ahli untuk pendampingan teknis personil BPSR **2.2.2** 1) BBM alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional 2) Pelumas alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional 3) Service dan penggantian suku cadang alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional 4) Pemeliharaan infrastruktur, bangunan,	4.2.1 1. Terlaksananya kegiatan asesment dari KAN 2. Tersedianya pembayaran berlangganan telepon, internet, listrik, dan koran. 3. Terlaksananya perjalanan dinas 4. Terbayaranya honorarium non PNS 5. Terlaksananya pengujian di TPPAS Legok Nangka, TPK Sarimukti, TPPAS leuwigajah 6. Tersedianya barang pakai habis **4.2.1** 1. Pengadaan perlengkapan kantor 2. Pengadaan komputer 3. Pengadaan meubelair 4. Pengadaan alat komunikasi 5. Pengadaan alat ukur 6. Pengadaan alat laboratorium 7. Renovasi mushola 8. Pengadaan Kendaraan Lapangan 9. Karoseri Kendaraan Lapangan. 10. Pengadaan Alat Sampling Udara dan Debu 11. Pengadaan Lemari Laboratorium 12. Pembuatan Ruang Penerima Contoh Uji Seksi Uji Air dan Lingkungan 13. Pengadaan Alat Studio	**4.2.1** 1. Terpeliharanya perlengkapan laboratorium 2. Terpeliharanya peralatan laboratorium 3. Terpeliharanya gedung BPMKL 4. Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan kantor 5. Terpeliharanya seluruh kendaraan operasional	**4.2.1** 1. Peningkatan kompetensi personil BPMKL dalam bidang manajamen dan atau teknis laboratorium berdasarkan SNI/ISO IEC 17025:2008. 2.Peningkatan kualitas kesehatan personil BPMKL 3. Peningkatan kualitas spirtual personil BPMKL

www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange
www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange

KASIE BINA TEKNIK DAN GEDUNG NEGARA	KASIE PEM BERDAYAAN	KASIE PENGATURAN DAN PENGAWASAN	KA SUB BAG TATA USAHA	KOORDINATOR SUB UNIT RUMAH SUSUN SEWA	KA SUB BAG TATA USAHA	KASIE PERENCANAAN DAN EVALUASI	KASIE OPERASIONAL	KA SUB BAG TATA USAHA	KASIE UJI TANAH BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	KASIE UJI [illegible] DAN [illegible]
							[illegible] dan perlengkapan kantor			

www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange
www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

VISI: Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua

- **Misi 1: Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
  - Tujuan : Membangun Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Senantiasa Berkarya, Kompetitif, dengan Tetap Mempertahankan Identitas dan Ciri Khas Masyarakat yang Santun dan Berbudaya
    - Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang Terjangkau dan Merata
      - Indikator 2: Indeks Kesehatan
        - Strategi 3: Menguatkan Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan
          - Kebijakan 3: Penguatan Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan
- **Misi 2: Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan**
  - Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah
    - Sasaran 5: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional
      - Indikator 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi
        - Strategi 1: Memperluas Kesempatan Kerja
          - Kebijakan: Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- **Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik**
  - Tujuan: Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel Serta Perluasan Partisipasi Publik
    - Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan serta Perluasan Partisipasi Publik
      - Indikator 1: Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan
        - Strategi 1: Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat
        - Strategi 2: Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
      - Indikator 2: Indeks Daya Saing Provinsi
    - Sasaran 2: Meningkatnya Profesionalisme Aparatur
      - Indikator: Tingkat Kompetensi Aparatur
    - Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK
      - Indikator 1: Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
        - Strategi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif
          - Kebijakan 11: Mewujudkan tertib administrasi pertanahan
            - Sasaran Renstra: Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan
              - Indikator Renstra 1: Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
                - Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi
                - Sosialisasi tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum — Rp 227.400.000,00
                - Koordinasi dan Konsultasi persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum — Rp 264.000.000,00
              - Indikator Renstra 2: Tersusunnya neraca pengusaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
                - Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi
                - Koordinasi Penatagunaan Tanah kab/kota se-Jawa Barat — Rp 226.165.000,00
                - Inventarisasi Pengusasaan dan Konflik Pertanahan untuk Kepentingan Strategis Provinsi — Rp 448.315.000,00
              - Indikator Renstra 3: Tersediamya data dan informasi spasial dan non spasial
                - Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi
                - Pembuatan Peta Dasar Skala Detail Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat — Rp 2.000.000.000,00
      - Indikator 2: Indeks Keterbukaan Informasi Publik
      - Indikator 3: Indeks Persepsi Korupsi
    - Sasaran 4: Meningkatnya Stabilitas Tibumtrahmas, Kesadaran Politik dan Hukum
      - Indikator 1: Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
      - Indikator 2: Indeks Demokrasi
      - Indikator 3: Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
- **Misi 4: Mewujudkan JawaBarat yang Nyaman Dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan**
  - Tujuan 1: Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kelestarian pembangunan.
    - Sasaran: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.
      - Indikator 1: Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
        - Strategi 1: Peningkatan Kinerja Penataan Ruang
          - Kebijakan 1: Meningkatkan Proses Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
        - Strategi 2: Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Kawasan Lindung
          - Kebijakan: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Lindung Hutan Dan Non Hutan
  - Tujuan 2: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar
    - Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Permukiman Infrastruktur Dasar Masyarakat
      - Indikator 1: Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
        - Strategi: Meningkatkan Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Persampahan)
          - Kebijakan 1: Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan
            - Sasaran Renstra: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi
              - Indikator Renstra: Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
                - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
                - Perencanaan Penanganan Persampahan di Daerah Aliran Anak Sungai Citarum — Rp 1.273.000.000,00
          - Kebijakan 2: Peningkatan Pengolahan Sampah Skala Regional
            - Sasaran Renstra: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak
              - Indikator Renstra: Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
      - Indikator 2: Cakupan Pelayanan Air Minum
        - Strategi: Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman (Air Minum)
          - Kebijakan 1: Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum
            - Sasaran Renstra: Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum
              - Indikator Renstra: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum
                - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
                - Penyelenggaraan Program Pamsimas — Rp 458.000.000,00
                - Penyusunan Kajian Teknis Peraturan Gubernur Rencana Induk SPAM Jawa Barat — Rp 60.000.000,00
          - Kebijakan 2: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Air Minum Regional
            - Sasaran Renstra: Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum
              - Indikator Renstra: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum
                - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
                - Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung Wilayah Selatan — Rp 30.565.000.000,00
                - Penyusunan Rencana Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung — Rp 975.000.000,00
      - Indikator 3: Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
        - Strategi: Meningkatkan Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Air Limbah)
          - Kebijakan 1: Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
            - Sasaran Renstra: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi
              - Indikator Renstra: Meningkatnya cakupan pelayan air limbah domestik
                - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
                - Workshop Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kab/Kota — Rp 178.500.000,00
                - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi di Jawa Barat — Rp 319.525.000,00
                - GCB-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi dalam Rangka Gerakan Citarum Bestari — Rp 125.000.000,00
                - Penyusunan DED Long Storage Air Hujan Melong di Metropolitan Bandung Raya — Rp 496.450.000,00
                - Penyusunan DED Drainase Rancaekek di Metropolitan Bandung — Rp 644.000.000,00
                - Penyusunan DED Drainase Gedebage di Metropolitan Bandung — Rp 648.000.000,00
                - Penyusunan DED Drainase Pagarsih-Pasteur di Metropolitan Bandung — Rp 648.000.000,00
                - Program Mitigasi dan Perubahan Iklim
                - Penyelenggaraan Rencana aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim (GRK) — Rp 89.600.000,00
      - Indikator 4: Penyediaan Rumah Layak Huni
        - Strategi: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan
          - Kebijakan 1: Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni untuk Rakyat Miskin dan Buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)
            - Sasaran Renstra: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni
              - Indikator Renstra: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
                - Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
                - Kajian Resolusi Konflik Apartemen dan Rusunawa di Provinsi Jawa Barat — Rp 200.000.000,00
                - Perancangan Penyediaan Perumahan (Rusunawa) — Rp 3.309.850,00
                - Pembentukan Kelompok Kepemilikan Rumah bagi MBR Non Bankable — Rp 350.000.000,00
                - Penyelenggaraan Klinik Rumah — Rp 100.000.000,00
                - Penyusunan Strategi dan Program Perumahan di Jawa Barat — Rp 467.085.000,00
                - Pendampingan Fasilitator Rutilahu dan Koordinator Kota — Rp 1.834.700.000,00
                - Manajemen Peningkatan kualitas Rutilahu — Rp 1.984.000.000,00
                - Penyusunan DED Jalan Lingkungan dan Drainase Relokasi Pasca Bencana Alam tahun 2015 — Rp 600.000.000,00
                - Penyusunan Regulasi Pembuatan Sumur Resapan/Biopori di Lingkungan Perumahan — Rp 150.000.000,00
                - Pembuatan Sumur Resapan/Biopori Percontohan — Rp 100.000.000,00
                - Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPJB — Rp 1.575.350.000,00
                - Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Barat — Rp 1.974.144.000,00
                - Pemotongan Tanah Ciriaich dalam rangka peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas Rusunawa — Rp 533.300.000,00
                - Pengadaan dan Pemasangan genset serta kelengkapannya (rusunawa Rancaekek) — Rp 200.000.000,00
                - Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas di Rusunawa Rancaekek — Rp 6.933.650.000,00
                - Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Solokan Jeruk — Rp 2.773.550.000,00
                - Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Batujajar — Rp 1.205.400.000,00
                - Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Ujungberung — Rp 2.799.400.000,00
                - Program Pembinaan Jasa Konstruksi
                - Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara — Rp 500.000.000,00
          - Kebijakan 2: Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Hunian
            - Sasaran Renstra 1: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
              - Indikator Renstra: Penurunan Luas Kawasan Kumuh
                - Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
                - Penataan Kawasan Kumuh di Kota Sukabumi — Rp 3.309.000.000,00
                - Penataan Kawasan Kumuh di Kota Cirebon — Rp 3.309.000.000,00
                - Identifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Jawa Barat — Rp 471.205.000,00
                - Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan Indramayu — Rp 270.000.000,00
                - Penyusunan Kajian Infrastruktur Kawasan Minapolitan di Pantura Jabar — Rp 465.030.000,00
                - Penyusunan Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan di Kawasan Strategis Provinsi Pangandaran dan Sekitarnya — Rp 431.030.000,00
                - Penyusunan Kajian Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan — Rp 393.130.000,00
              - Indikator Renstra: Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota se-Jawa Barat — Rp 650.000.000,00
              - Penyusunan Kajian Teknis Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat — Rp 500.000.000,00
              - Penyusunan perencanaan Landscape Masjid Raya Provinsi Jawa Barat — Rp 1.473.600.000,00
              - Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon — Rp 2.649.700.000,00
              - Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur — Rp 15.827.750.000,00
              - Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cikembar Sukabumi (Lanjutan) — Rp 14.908.775.000,00
              - Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran (Lanjutan) — Rp 10.945.325,00
              - Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut (Lanjutan) — Rp 13.966.275.000,00
              - Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong Kabupaten Bogor — Rp 8.418.400.000,00
              - Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Sukaraja Kabupaten Sukabumi — Rp 12.943.300.000,00
              - Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka — Rp 9.337.905.000,00
              - Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Cikalong Kabupaten Tasikmalaya — Rp 8.204.100.000,00
            - Sasaran Renstra 2: Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman
              - Indikator Renstra: Terbangunnya Prasaran Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman
- **Misi 5: Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni, dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, Serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal**
  - Tujuan 2: Mewujudkan Pemuda yang Tangguh dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Prestasi Olah Raga
    - Sasaran: Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan Prestasi Olah Raga, serta Penanganan Komunitas Tertentu
      - Indikator: Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
        - Strategi 1: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga
          - Kebijakan: Pendukungan Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kota/Kabupaten
  - Tujuan 3: Melestarikan Seni dan Budaya berbasis Kearifan Lokal dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
    - Sasaran: Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Olahraga, Seni, Budaya, dan Pariwisata
      - Indikator: Jumlah Karya Seni dan Budaya yang Didaftarkan untuk Memperoleh HAKI/Sertifikasi Badan Internasional
        - Strategi 3: Mengekalkan Apresiasi Masyarakat terhadap Seni dan Perfilman Daerah
          - Kebijakan: Peningkatan Pelestarian Seni dan Perfilman Daerah Serta Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
JL. Kawaluyaan Indah No. 4 Telp. 7319782 – 7319735 Fax. 7313675 Bandung 40286
Website : http://diskimrum.jabarprov.go.id/ e-mail: ppdiskimrum@yahoo.com

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 800.05/Kep. 62/PP

Tentang

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jasa Konstruksi;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kawasn Bandung Utara.
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat 2005 – 2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat;
46. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
47. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2013 – 2018;
48. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun Anggaran 2016, selanjutnya disebut Tim, dengan susunan personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:

a. Melakukan pengumpulan data dan laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari Sekretariat, setiap Bidang dan Balai Dinas Permukiman dan Perumahan;
b. Melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari Sekretariat, setiap Bidang dan Balai Dinas Permukiman dan Perumahan;
c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2016;
d. Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2016 kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2016 dibebankan

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

pada Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 November 2016

KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. BAMBANG RIANTO, MSc.
Pembina Utama Muda
NIP 19620116 199103 1 004

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR :
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016
TENTANG : PENUNJUKKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

SUSUNAN PERSONALIA

Penanggungjawab : Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan
Ketua : Sekretaris Dinas Permukiman dan Perumahan
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Ruang Kawasan
2. Kepala Bidang Permukiman
3. Kepala Bidang Perumahan
4. Kepala Bidang Jasa Konstruksi
5. Kepala UPTD Balai Pengujian Mutu Konstruksi & Lingkungan
6. Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Regional Jawa Barat
7. Kepala UPTD Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan
8. Kepala Sub Bagian Keuangan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Program
11. Kepala Seksi Tata Perkotaan & Perdesaan
12. Kepala Seksi Kawasan Strategis
13. Kepala Seksi Pengendalian & Pengawasan
14. Kepala Seksi Air Minum
15. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
16. Kepala Seksi Tata Bangunan & Lingkungan
17. Kepala Seksi Perumahan Perkotaan
18. Kepala Seksi Perumahan Perdesaaan
19. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan
20. Kepala Seksi Bina Teknik & Gedung Negara
21. Kepala Seksi Pemberdayaan
22. Kepala Seksi Pengaturan & Pengawasan
23. Taufik Rahmat, S.Pd., M.T.
24. Herni Sundari, S.T.
25. Taufan Gurnasa, S.T., M.T.
26. Ayu Kuswantinah, S.Sos., M.T.
27. Dadang, S.T.
28. Arif Perdana, S.T.
29. Dewi Hartiati, S.T.
30. Hendarwan, S.T.
31. Tuty Indhira Jati, S.T. MT
32. Ovie Atika, S.T.
33. Irvan Rusdiansyah, ST. MM

KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. BAMBANG RIANTO, MSc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620116 199103 1 004

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com
PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016

TENTANG : PENUNJUKKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

URAIAN TUGAS

Penanggungjawab : Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelancaran proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2016.

Ketua :
a. Memimpin seluruh proses penyusunan LKIP;
b. Melakukan komunikasi intensif dan koordinasi dengan Kepala Bidang, Kepala Balai untuk kelancaran proses penyusunan LKIP;
c. Melaporkan hasil penyusunan LKIP kepada Kepala Dinas.

Sekretaris :
a. Mengkoordinasikan tatalaksana dan tatausaha penyusunan LKIP;
b. Melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat dalam penyusunan LKIP;
c. Melakukan pengumpulan data dan laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari setiap Bidang, dan Balai;
d. Melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari Sekretariat, setiap Bidang, dan Balai;
e. Menyusun LKIP pada Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2016.

Anggota :
a. Membantu tatalaksana dan tatausaha penyusunan LKIP;
b. Membantu melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat dalam penyusunan LKIP;
c. Membantu melakukan pengumpulan data dan laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari setiap Bidang, dan Balai;
d. Membantu melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari setiap Bidang, dan Balai;
e. Membantu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2016.

KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. BAMBANG RIANTO, MSc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620116 199103 1 004

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

VISI: Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua

Misi 1: Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- **Tujuan**: Membangun Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Senantiasa Berkarya, Kompetitif, dengan Tetap Mempertahankan Identitas Sifat Ciri Khas Masyarakat yang Santun dan Berbudaya
  - **Sasaran 2**: Meningkatnya Aksesibilitas Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang Terjangkau dan Merata
    - **Indikator 2**: Indeks Kesehatan
      - **Strategi 3**: Menguatkan Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan
        - **Kebijakan 3**: Penguatan Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan
          - **Program Sumber Daya Kesehatan**
            - Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru — Rp 40,585,600.00
            - Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat — Rp 14,315,405,000.00

Misi 2: Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan

- **Tujuan**: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah
  - **Sasaran 5**: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional
    - **Indikator 1**: Laju Pertumbuhan Ekonomi
      - **Strategi 1**: Memperluas Kesempatan Kerja
        - **Kebijakan**: Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya Kemampuan dan Ketertiban Penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa Konstruksi
            - **Indikator Renstra**: Persentase Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi yang Bersertifikat
              - **Program Pembinaan Jasa Konstruksi**
                - Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi — Rp 923,000,000.00
                - Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara — Rp 805,651,000.00
                - Pemberdayaan Jasa Konstruksi — Rp 1,495,000,000.00

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Berkepercayaan

- **Tujuan 1**: Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.
  - **Sasaran**: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.
    - **Indikator 1**: Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
      - **Strategi 1**: Peningkatan Kinerja Penataan Ruang
        - **Kebijakan 1**: Meningkatkan Proses Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
          - **Sasaran Renstra 1**: Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat
            - **Indikator Renstra 1**: Jumlah Ketersediaan Kajian Perda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Jawa Barat
              - **Program Penataan Ruang**
                - Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan — Rp 456,640,000.00
                - Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Karst Citatah — Rp 830,704,000.00
                - METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur Kabupaten Bogor — Rp 927,635,000.00
                - METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Water Front City Cirebon — Rp 31,800,000.00
                - METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor — Rp 695,159,000.00
                - CLTH-Perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan — Rp 283,785,000.00
                - Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hasil Review RTRWP Jawa Barat — Rp 700,235,000.00
            - **Indikator Renstra 2**: Jumlah Ketersediaan Kajian Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota di Jawa Barat
              - **Program Penataan Ruang**
                - Evaluasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota — Rp 469,325,000.00
          - **Sasaran Renstra 2**: Terselenggarannya Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan
            - **Indikator Renstra 1**: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandung Utara
              - **Program Penataan Ruang**
                - Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat — Rp 849,135,000.00
      - **Strategi 2**: Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Kawasan Lindung
        - **Kebijakan**: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Lindung Hutan Dan Non Hutan
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya luas Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat
            - **Indikator Renstra**: Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan
              - **Program Penataan Ruang**
                - Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat — Rp 321,225,000.00
              - **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**
                - Perencanaan dan Pembangunan Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat — Rp 13,497,000,000.00
                - Penataan Kawasan Gasibu Tahap II — Rp 19,733,698,000.00
                - Penataan Kawasan Gasibu Tahap III — Rp 13,092,111,000.00
                - Konsep Pembangunan Public Art Work Sister Province Jawa Barat dan Australia Selatan — Rp 160,000,000.00

Misi 4: Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman Dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

- **Tujuan 2**: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar
  - **Sasaran 1**: Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat
    - **Indikator 2**: Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
      - **Strategi**: Meningkatkan Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Persampahan)
        - **Kebijakan 1**: Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak
            - **Indikator Renstra**: Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
              - **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**
                - Penyusunan Rencana Induk Persampahan dan TPPAS Regional Ciayumajakuning — Rp 1,010,690,000.00
        - **Kebijakan 2**: Peningkatan Pengolahan Sampah Skala Regional
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak
            - **Indikator Renstra**: Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
              - **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**
                - Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka — Rp 4,441,217,300
                - Pembangunan TPPAS Regional Nambo — Rp 4,686,980,000.00
                - Advisory Teknis BPSR — Rp 1,264,250,000.00
                - Pengelolaan TPK Sarimukti — Rp 11,981,619,500.00
                - Penataan TPA Leuwigajah — Rp 704,920,000.00
    - **Indikator 3**: Cakupan Pelayanan Air Minum
      - **Strategi**: Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman (Air Minum)
        - **Kebijakan 1**: Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak
            - **Indikator Renstra**: Cakupan Pelayanan Air Minum
              - **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**
                - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat — Rp 283,000,000.00
                - Pengembangan SPAM Perdesaan — Rp 551,150,000.00
                - METR Penyusunan Rencana Induk SPAM Jawa Barat — Rp 1,708,875,000.00
        - **Kebijakan 2**: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Air Minum Regional
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak
            - **Indikator Renstra**: Cakupan Pelayanan Air Minum
              - **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**
                - METR Pengembangan SPAM Metropolitan Bandung Raya — Rp 19,450,610,000.00
    - **Indikator 4**: Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
      - **Strategi**: Meningkatkan Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Air Limbah)
        - **Kebijakan 1**: Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak
            - **Indikator Renstra**: Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
              - **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**
                - PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu — Rp 1,076,880,000.00
                - PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya — Rp 790,142,000.00
                - PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran — Rp 13,042,000.00
                - METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Cirebon Raya — Rp 1,409,062,000.00
                - METR - Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bandung Raya — Rp 1,487,101,000.00
                - METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur — Rp 1,559,053,000.00
                - GCB - Monitoring dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Sanitasi Berbumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum — Rp 43,853,750.00
                - SANI - Monitoring dan Evaluasi Teknis Pembangunan Sanitasi Jawa Barat — Rp 566,970,000.00
    - **Indikator 5**: Penyediaan Rumah Layak Huni
      - **Strategi**: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan
        - **Kebijakan 1**: Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni untuk Rakyat Miskin dan Buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni
            - **Indikator Renstra**: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
              - **Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**
                - METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bandung Raya — Rp 938,367,500.00
                - METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya — Rp 974,226,000.00
                - METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bodebekkarpur — Rp 1,092,885,000.00
                - PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran — Rp 486,568,000.00
                - PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu — Rp 480,826,000.00
                - PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya — Rp 472,972,000.00
                - RTLH_Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan — Rp 1,765,432,500.00
                - Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Permukiman dan Perumahan — Rp 87,609,000.00
                - Kajian Lingkungan Pembangunan RUSUNAWA di Kab. Bandung Barat dan Kota Bogor — Rp 967,981,000.00
                - Perencanaan dan Identifikasi Lokasi Pembangunan Rusunawa di KSP Jatinangor, Kota/Kab. Sukabumi dan Kab/Kota. Cirebon — Rp 481,867,000.00
              - **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**
                - Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa — Rp 5,590,716,800.00
        - **Kebijakan 2**: Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Hunian
          - **Sasaran Renstra**: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni
            - **Indikator Renstra**: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
              - **Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**
                - Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan — Rp 287,007,000.00
                - Pendataan Bidang Perumahan di Jawa Barat — Rp 457,796,500.00
                - Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat — Rp 64,392,045,800.00
                - Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage — Rp 19,733,698,000.00

Misi 5: Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni, dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, Serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

- **Tujuan 2**: Mewujudkan Pemuda yang Tangguh dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Prestasi Olah Raga
  - **Sasaran**: Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan Prestasi Olah Raga, serta Penanganan Komunitas Tertentu
    - **Indikator**: Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
      - **Strategi 1**: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga
        - **Kebijakan**: Pendukungan Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kota/Kabupaten
          - **Program Pembinaan, Pemasyarakatan, dan Pengembangan Olah Raga**
            - PONPAR Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Permanen Pendukung Venue PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat — Rp 32,842,806,000.00
            - PONPAR Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat — Rp 27,129,071,200.00
- **Tujuan 3**: Melestarikan Seni dan Budaya berbasis Kearifan Lokal dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
  - **Sasaran**: Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Olahraga, Seni, Budaya, dan Pariwisata
    - **Indikator**: Jumlah Karya Seni dan Budaya yang Diidaftarkan untuk Memperoleh HAKI/Sertifikasi Badan Internasional
      - **Strategi 3**: Meningkatkan Apresiasi Masyarakat terhadap Seni dan Perfilman Daerah
        - **Kebijakan**: Peningkatan Pelestarian Seni dan Perfilman Daerah Serta Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya
          - **Program Pengembangan Nilai Budaya**
            - Penyusunan DED Museum Jatigede — Rp 1,492,245,000.00